



Pendampingan Pemangku Kepentingan Dalam Governansi Ekowisata Pesisir Di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Alfiandri Alfiandri¹, Eko Prasoj², Roy Variant Salomo³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia^{2,3}

Email Korespodensi: alfiandi@umrah.ac.id¹

Abstrak

Pendampingan pemangku kepentingan dalam mengelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi dalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi, khususnya terkait dengan hutan mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata pesisir di kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan workshop, yang melibatkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan ekowisata, serta cara-cara untuk mengatasi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya infrastruktur yang mendukung. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya kolaborasi semakin meningkat, dan mereka lebih memahami cara-cara untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan. Pembahasan lebih lanjut mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan yang efektif, seperti pengelolaan mangrove dan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kesimpulan dari artikel ini menyarankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak, serta perlunya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan dan berkelanjutan di Pulau Bintan.

Catatan Artikel

Dikirim: 12 Desember 2024

Dirivisi: 28 Desember 2024

Diterima: 31 Desember 2024

Kata Kunci

Pendampingan; Pemangku Kepentingan, Tata Kelola, Governansi

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v1i1.83>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam peran serta perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat (Riduwan, 2016). Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan berbagai konsep pembangunan yang berkelanjutan (Anowar et al., 2011; Idajati et al., 2016). Salah satu contoh nyata pengabdian kepada masyarakat adalah dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan yang dijalankan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Melalui pengelolaan Ekowisata Pesisir, diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan (Alfiandri et al., 2024).

Beberapa isu strategis terkait pengembangan wisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan berdasarkan hasil observasi tim, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan mangrove yang menjadi salah satu objek wisata utama di daerah tersebut (Mulyadi et al., 2017). Pulau Bintan yang kaya akan keindahan alamnya, terutama ekosistem mangrove, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat (Guannel et al., 2016). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara

optimal karena adanya tantangan dalam tata kelola dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Pada sisi lain, keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove yang berbasis pada prinsip ecotourism (Buckley, 2009; Sharpley, 2008), dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sangat diperlukan. Namun, untuk mencapai hal ini, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta akademisi, menjadi hal yang sangat krusial. Konsep tata kelola kolaborasi yang diterapkan dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, peran perguruan tinggi dalam Kegiatan ini sangat vital. Pengabdian ini yang berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor bisnis, masyarakat, dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk menciptakan model tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan (Lathrop & Ruma, 2010; Scott & Boyd, 2020). Dari sisi pemerintah, penerapan kebijakan yang mendukung kolaborasi antar sektor dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Alfiandri & Irawan, 2023; Alfiandri & Mayarni, 2023; Musa et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan ini. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang fokus pada wisata mangrove, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akbar & Ikhsan, 2019; Anggraini et al., 2022). Program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami nilai penting dari menjaga kelestarian lingkungan, sambil mengoptimalkan potensi wisata yang ada. Namun, diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa inisiatif ini dapat berkembang dengan baik.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem pengelolaan yang berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan akademisi yang dapat memberikan perspektif ilmiah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi, melalui Kegiatan dan kajian yang dilakukan, berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di lapangan. Sebagai contoh, hasil-hasil kajian yang berfokus pada pengembangan tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, bertujuan untuk menghasilkan model yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola wisata berbasis lingkungan, tetapi juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata di Pulau Bintan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang lebih baik, yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga melestarikan kekayaan alam yang ada. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ini demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang ada.

Pendampingan Pemangku Kepentingan yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan platform bagi pemangku kepentingan dalam mendalami dan memahami konsep governance dalam pengelolaan ekowisata pesisir, khususnya di Pulau Bintan. Melalui FGD ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang berbasis kolaborasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, serta sektor swasta. Pemangku kepentingan akan diberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antar sektor dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan yang ada di Pulau Bintan.

Selain itu, tujuan Pendampingan ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yang dapat mengoptimalkan potensi alam dan budaya setempat, sembari melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi

kebijakan dan strategi pengelolaan ekowisata, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan dalam program ini berfokus pada pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi (Gautama et al., 2020). Pendekatan ini dimulai dengan serangkaian kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep Tata Kelola dalam pengelolaan ekowisata pesisir. Melalui pelatihan, diskusi, dan FGD (Afiyanti, 2008; Schneider et al., 2016), para pemangku kepentingan akan diberi pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi antar sektor dalam mengelola sumber daya alam pesisir secara berkelanjutan. Pendampingan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengelolaan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan ekonomi masyarakat tetapi juga mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya Para peserta akan dilibatkan dalam berbagai sesi diskusi dan workshop yang berfokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan ekowisata pesisir, serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan ini, setiap aktor dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian dan perspektifnya masing-masing, menciptakan sebuah model tata kelola yang lebih holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini akan mengoptimalkan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan ekowisata, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih mudah diimplementasikan.

Sebagai bagian dari metode pengabdian ini, evaluasi dan monitoring juga akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil diskusi dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Para pemangku kepentingan akan diajarkan cara melakukan evaluasi terhadap program ekowisata yang sudah ada serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Monitoring ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan ekowisata tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pengembangan kapasitas dan evaluasi berkelanjutan, pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi pengelolaan ekowisata pesisir di Pulau Bintan.

Hasil dan Pembahasan

1. FGD Pemangku Kepentingan Tentang Tata Kelola Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

a. Sesi Pertama

Pada sesi pertama, FGD dimulai dengan pengenalan dari tim pengabdian yang menjelaskan tujuan kegiatan dan metodologi yang digunakan, termasuk penerapan tata kelola kolaborasi pemerintahan dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah bagaimana mengembangkan proyek ekowisata yang tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor bisnis, akademisi, media massa, dan masyarakat setempat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif. Kegiatan menjelaskan model pemerintahan Kolaborasi yang didasarkan pada konsep Ansel & Gash, di mana berbagai aktor, seperti pemerintah, bisnis, masyarakat, perguruan tinggi, dan media, bekerja sama untuk mengelola ekowisata secara berkelanjutan dan efektif, tanpa mengabaikan pentingnya nilai sosial dan lingkungan.

Beberapa peserta FGD mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata, seperti konflik lahan, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta dampak ekonomi. Mereka juga mengingatkan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi, seperti penghancuran mangrove untuk pembangunan, yang mengancam keberlanjutan ekowisata di Pulau Bintan. Diskusi kemudian berfokus pada contoh nyata penerapan ekowisata, terutama yang berbasis pada konservasi mangrove. Beberapa peserta berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan wisata berbasis

mangrove di daerah seperti Tanjungpinang dan Bintan. Mereka membahas tantangan yang mereka hadapi, seperti pengelolaan sampah dan kurangnya dukungan infrastruktur, serta bagaimana pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove.

Peserta dari lembaga pemerintah membahas peran mereka dalam mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang jelas dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Namun, ada kekhawatiran terkait efisiensi birokrasi dan koordinasi yang kurang baik antar lembaga pemerintahan, yang sering menghambat implementasi kebijakan secara efektif. Tema lain yang penting adalah integrasi nilai budaya lokal dalam aktivitas pariwisata. Beberapa peserta dari lembaga budaya dan masyarakat adat menekankan bahwa meskipun manfaat ekonomi dari pariwisata sangat penting, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat harus tetap menjadi fokus utama. Hal ini untuk memastikan bahwa pariwisata tidak merusak identitas budaya masyarakat, tetapi justru memperkenalkan kekayaan budaya tersebut kepada wisatawan.



Gambar 1. FGD di Sesi Pertama

Sumber: Tim Pengabdian, 2021

Diskusi ditutup dengan pembahasan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kolaborasi dan memperbaiki praktik ekowisata. Peserta sepakat bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan melibatkan dialog berkelanjutan antara semua pihak akan sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi, agar manfaat ekowisata bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, FGD ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan ekowisata pesisir di Pulau Bintan, serta bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal. Hasil diskusi ini akan menjadi referensi untuk disertasi Kegiatan dan kebijakan terkait pariwisata berkelanjutan di masa depan.

b. Sesi Kedua

Hasil FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan pada sesi kedua membahas topik Tata Kelola Kolaborasi dalam pembangunan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan akademisi. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menggali pemahaman dan solusi terkait bagaimana kolaborasi antar berbagai aktor dapat mempercepat pembangunan pariwisata berbasis ekologi di kawasan pesisir. Dalam diskusi ini, para peserta berfokus pada pentingnya peran aktif semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta media dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan, memelihara keaslian ekosistem, dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Para peserta FGD menyoroti tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan, terutama terkait dengan konservasi mangrove. Salah satu narasumber, Andri dari Bintan Resort, mengungkapkan bahwa meskipun hutan mangrove di Lagoi menarik minat wisatawan mancanegara, ada masalah terkait pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat lokal yang kurang memahami cara mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Sebagai solusi, pihak swasta berinisiatif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari ekowisata yang dikelola dengan baik.

Kemudian berbagai instansi pemerintah turut menyampaikan pandangan mereka mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan. Sinaga dari Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir, terutama dalam hal pemberdayaan nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem mangrove. Hal ini sejalan dengan pandangan banyak peserta yang menyarankan agar kebijakan pariwisata berbasis lingkungan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan lainnya yang diangkat dalam FGD ini adalah kurangnya koordinasi antar sektor dan rendahnya tingkat perhatian pemerintah terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat. Meskipun ada beberapa program yang sudah dijalankan, banyak peserta yang merasa bahwa dukungan pemerintah baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten masih belum maksimal. Para pelaku wisata lokal merasa bahwa pengembangan pariwisata yang ada saat ini lebih banyak bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat .



Gambar 2. FGD di Sesi Kedua
Sumber: Tim Pengabdian, 2021

Para Peserta FGD menyatakan agar lebih banyak kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata di Pulau Bintan. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan wisata yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bintan Resort, misalnya, menjelaskan bahwa mereka telah berupaya mengedukasi masyarakat untuk tidak merusak hutan mangrove dan memberikan peluang bagi mereka untuk berperan aktif sebagai operator ekowisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan hal pemangku kepentingan juga menekankan pentingnya pemanfaatan media massa dan perguruan tinggi dalam menyebarkan informasi tentang manfaat konservasi hutan mangrove sebagai bagian dari destinasi wisata. Media diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat dan menarik minat wisatawan, baik domestik maupun internasional, terhadap keunikan dan potensi yang dimiliki oleh Pulau Bintan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam melakukan riset dan pendampingan untuk

memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, FGD ini menghasilkan rekomendasi penting untuk pengembangan Ekowisata Pesisir yang berkelanjutan di Pulau Bintan. Salah satunya adalah perlunya integrasi antara berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, hingga akademisi, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip kolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan mangrove, juga dianggap sebagai kunci untuk memastikan keberlanjutan dari pariwisata berbasis lingkungan di kawasan pesisir. Para peserta FGD optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, potensi wisata berbasis ekologi di kawasan pesisir Pulau Bintan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Peningkatan komunikasi, transparansi, serta sinergi antar aktor yang terlibat menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

Tantangan utama dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan terletak pada koordinasi yang kurang baik antar pemangku kepentingan. Dalam kedua sesi FGD, para peserta mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, namun implementasi kebijakan yang belum efektif sering kali menghambat pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Ketidaksiharian antara kebijakan yang ada dengan kenyataan di lapangan menjadi masalah, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu contoh yang disoroti adalah rendahnya tingkat perhatian pemerintah terhadap sektor wisata berbasis masyarakat, meskipun beberapa program telah dijalankan, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat belum optimal.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam seperti hutan mangrove menghadapi tantangan serius. Meskipun potensi ekowisata berbasis mangrove sangat besar, banyak masyarakat lokal yang belum sepenuhnya memahami cara mengelola dan menjaga keberlanjutan ekosistem ini. Beberapa peserta FGD mengungkapkan bahwa kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dan pembalakan liar, mengancam keberlanjutan ekowisata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Masyarakat lokal sering kali terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap ekosistem, sehingga pendidikan dan sosialisasi mengenai pelestarian mangrove menjadi sangat penting.

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekowisata di Pulau Bintan. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses transportasi dan fasilitas pendukung wisata, menghambat perkembangan sektor pariwisata berbasis ekologi. Meskipun Pulau Bintan memiliki potensi alam yang luar biasa, aksesibilitas yang rendah dan kurangnya fasilitas yang ramah lingkungan menjadi kendala bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar seperti Bintan Resort, berusaha memberikan solusi dengan mengedukasi masyarakat lokal dan memperkenalkan model ekowisata yang berbasis pada pelestarian alam.

Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan ekowisata akan tetap terbatas. Terakhir, tantangan dalam tata kelola Kolaborasi untuk ekowisata di Pulau Bintan juga mencakup masalah sosial dan budaya. Meskipun ada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari pariwisata, melestarikan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat harus tetap menjadi prioritas. Beberapa peserta FGD menekankan pentingnya menjaga identitas budaya masyarakat agar pariwisata tidak merusak nilai-nilai tersebut. Integrasi nilai budaya dalam ekowisata menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari sisi sosial dan budaya. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk lembaga budaya dan masyarakat adat, perlu diperkuat agar pariwisata dapat menjadi sarana yang memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada dunia, tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian budaya tersebut.

3. Peran Komunitas Lokal dalam Tata Kelola Kolaborasi untuk Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan

Peran komunitas lokal dalam tata kelola kolaborasi untuk ekowisata pesisir di Pulau Bintan sangat penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam berbagai sesi FGD yang diadakan, para peserta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam mengelola ekosistem pesisir, khususnya dalam konservasi mangrove yang menjadi salah satu daya tarik utama ekowisata di kawasan tersebut. Komunitas lokal, terutama nelayan tradisional yang bergantung pada ekosistem mangrove, diharapkan dapat lebih aktif dalam menjaga kelestarian alam. Keterlibatan mereka tidak hanya berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan mereka manfaat ekonomi langsung dari pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. Sehingga, dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga alam, masyarakat lokal dapat merasakan keuntungan jangka panjang yang berasal dari ekowisata, tanpa harus mengorbankan keberlanjutan alam.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan juga sangat penting dalam memperkuat peran komunitas lokal. FGD menunjukkan bahwa beberapa pihak swasta, seperti Bintan Resort, telah berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan dampak positif yang bisa didapatkan dari ekowisata yang berbasis pada pelestarian lingkungan. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat menyadari potensi ekonomi yang terkandung dalam pengelolaan alam secara berkelanjutan, seperti pengembangan wisata berbasis alam yang memanfaatkan keindahan hutan mangrove. Ini memberikan mereka alternatif ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan yang mereka andalkan.

Dalam konteks kolaborasi antar pemangku kepentingan, peran komunitas lokal juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan sinergi yang efektif antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. Komunitas lokal di Pulau Bintan berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aktor tersebut, memberikan perspektif lokal yang sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang berbasis pada keberlanjutan. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga terkait kondisi alam dan sosial yang ada, yang dapat membantu sektor-sektor lain dalam merencanakan pengembangan ekowisata yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, semua pihak bisa bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, komunitas lokal memiliki peran ganda dalam tata kelola kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan, yaitu sebagai pelestari lingkungan dan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan ekowisata. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, baik melalui edukasi, pelatihan, maupun pemberdayaan ekonomi, komunitas lokal dapat menjadi motor penggerak keberlanjutan ekowisata di kawasan pesisir. Para peserta FGD sepakat bahwa tanpa peran aktif masyarakat setempat, ekowisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan akan kesulitan untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekowisata yang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola ekowisata pesisir di Pulau Bintan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan akademisi, sangat penting dalam mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan. Dalam kedua sesi FGD, disepakati bahwa tata kelola Kolaborasi yang melibatkan semua pihak secara aktif dapat mempercepat pengembangan ekowisata, mengingat potensi besar yang dimiliki Pulau Bintan, terutama dalam hal konservasi mangrove dan pelestarian lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah koordinasi yang kurang baik antara pemangku kepentingan serta kurangnya perhatian yang maksimal dari pemerintah terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tantangan lainnya yang mencuat dalam diskusi adalah kerusakan lingkungan, terutama pengrusakan hutan mangrove oleh masyarakat yang kurang memahami pentingnya keberlanjutan

ekosistem ini. Meskipun sektor swasta, seperti Bintan Resort, telah berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove, pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan masih terhambat oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan yang terstruktur menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan potensi ekowisata tanpa merusak alam.

Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat setempat perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi. Kolaborasi yang baik akan memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan keberlanjutan jangka panjang ekowisata. Komunitas lokal, khususnya nelayan tradisional, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sekaligus merasakan manfaat ekonomi dari ekowisata. Melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas mereka, masyarakat setempat dapat menjadi aktor utama dalam keberhasilan ekowisata di Pulau Bintan.

Tata kelola Kolaborasi dalam pengembangan ekowisata pesisir di Pulau Bintan memerlukan sinergi yang kuat antara semua pihak. Hanya dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pengelolaan ekowisata dapat berjalan dengan baik, menguntungkan bagi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, seperti pengelolaan mangrove, infrastruktur yang belum memadai, dan kesenjangan koordinasi antar sektor, untuk menciptakan ekowisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan pendampingan ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan potensi pengelolaan ekowisata pesisir di Pulau Bintan, serta kepada para pemangku kepentingan yang telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif. Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan LP3M yang telah mendukung kelancaran acara ini. Semoga hasil dari diskusi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan tata kelola pariwisata berbasis lingkungan di Pulau Bintan, serta memperkuat kolaborasi antar stakeholder untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/JKI.V12I1.201>
- Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). Public-Private Partnership Dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 128–136. <https://doi.org/10.20527/MC.V4I1.6358>
- Alfiandri, A., & Irawan, B. (2023). Collaborative Governance in Mangrove Ecotourism Policy on Bintan Island Coastal Approach of Penta Helix. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(1), 171–191. <https://doi.org/10.24198/JMPP.V7I1.49066>
- Alfiandri, A., & Mayarni, M. (2023). Implementation Model of Governance Policy for Developing Coastal Border Ecotourism in Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 70, 04005. <https://doi.org/10.1051/BIOCONF/20237004005>
- Alfiandri, A., Prasojo, E., Salomo, R. V., & Wicaksono, A. (2024). Beyond Volatility: Harnessing VUCA Methodology for Sustainable Collaboration in Bintan Island's Mangrove Ecotourism Governance. *Danube*, 15(2), 166–187. <https://doi.org/10.2478/DANB-2024-0010>

- Anggraini, R., Syakti, A. D., Idris, F., Febrianto, T., Wirayuhanto, H., & Suhana, M. P. (2022). Pengenalan Konsep Eko-eduwisata Mangrove di Desa Wisata Pengudang Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 8(1), 18–23. <https://doi.org/10.21107/PANGABDHI.V8I1.12463>
- Anowar, M., Bhuiyan, H., & Islam, R. (2011). The Role of Government for Ecotourism Development: Focusing on East Coast Economic Region. *Journal of Social Sciences*, 7(4), 557–564. <https://www.researchgate.net/publication/235660250>
- Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices. In *Tourism Management*. CABI.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Guannel, G., Arkema, K., Ruggiero, P., & Verutes, G. (2016). The Power of Three: Coral Reefs, Seagrasses and Mangroves Protect Coastal Regions and Increase Their Resilience. *PLOS ONE*, 11(7), e0158094. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0158094>
- Idajati, H., Pamungkas, A., & Vely Kukinul, S. (2016). The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 515–520. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.06.109>
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. In *Open government: Transparency, collaboration, and participation in practice*. O'Reilly Media.
- Mulyadi, A., Yoswaty, D., & Ilahi, I. (2017). Dampak lingkungan dari pengembangan ekowisata bahari di kawasan konservasi lamun Trikora, Bintan, Kepulauan Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, 45(1), 95–111. <https://doi.org/10.31258/TERUBUK.45.1.95>
- Musa, F., Fozi, N. M., Demiyah, D., & Hamdan, M. (2020). Coastal communities' willingness to pay for mangrove ecotourism in Marudu Bay, Sabah, Malaysia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 130–140. <https://doi.org/10.46754/jssm.2020.06.013>
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95–108.
- Schneider, S. J., Kerwin, J., Frechtling, J., & Vivari, B. A. (2016). Characteristics of the Discussion in Online and Face-to-Face Focus Groups: *Social Science Computer Review*, 20(1), 31–42. <https://doi.org/10.1177/089443930202000104>
- Scott, R. J., & Boyd, R. (2020). Determined to succeed: Can goal commitment sustain interagency collaboration? *Public Policy and Administration*, 095207672090500. <https://doi.org/10.1177/0952076720905002>
- Sharpley, R. (2008). Ecotourism: A Consumption Perspective. *Journal of Ecotourism*, 5(1–2), 7–22. <https://doi.org/10.1080/14724040608668444>